



2024

RENCANA KERJA

Presented by
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

#2024
KKP BEYOND

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran dan target).

Rencana kerja adalah dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan. Rencana kerja menjabarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan, indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Target kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja dan merupakan komitmen untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana kerja PPS Bitung tahun 2024 ini ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna dalam pencapaian kinerja dari sasaran (target) masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan, baik dari segi fisik maupun segi pembiayaan pada PPS Bitung. Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja PPS Bitung Tahun 2024 dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bitung, 12 Januari 2024



Ady Candra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
II. PERENCANAAN STRATEGIS	4
A. VISI DAN MISI	4
B. SASARAN STRATEGIS	4
III. RENCANA KINERJA	7
A. RENCANA KERJA	7
B. TARGET KINERJA	10
C. RENCANA PENCAPAIAN	11
D. RENCANA AKSI	16
IV. PENUTUP	18

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2021-2024 berbasis Ekonomi Biru dengan 5 arah kebijakan yaitu : (1) Perluasan wilayah konservasi perairan (30% dari luas perairan tahun 2045); (2) Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan; (3) Pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan tawar dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan; (4) Pengelolaan sampah laut (untuk mencapai sasaran pengurangan sampah laut 70% tahun 2030) dan (5) Pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil sebagai landasar pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Arah kebijakan diatas diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor; penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan teknologi satelit dan sistem karantina ikan; serta penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan. Melalui program-program berbasis ekonomi biru, diupayakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi.

Sejalan dengan arah kebijakan Ekonomi Biru, pembangunan di sub sektor perikanan tangkap menitikberatkan pada penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap WPP. Penerapan kebijakan prioritas ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kuota yang diberikan telah dijamin untuk mengutamakan kebutuhan nelayan kecil sebagai prioritas, sedangkan kuota sisanya akan ditawarkan kepada investor agar terjadi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang akhirnya akan dikembalikan kepada nelayan baik untuk peningkatan kesejahteraan maupun untuk perbaikan stok sumber daya ikan itu sendiri. Penangkapan ikan terukur mentransformasikan pengelolaan perikanan nasional menjadi lebih maju,

adil dan terkendali. Nelayan lokal, nelayan kecil serta pelaku usaha dalam negeri akan menjadi prioritas utama.

Langkah lain yang dilakukan dalam peningkatan kualitas hidup nelayan adalah dengan mengembangkan program Kampung Nelayan Maju (KALAJU) yang diselenggarakan di berbagai daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan yang lebih produktif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dari segi ekonomi, social dan lingkungan. Pengembangan KALAJU ini juga didukung oleh kementerian/Lembaga lainnya yang terkait. Program KALAJU tidak hanya dilakukan dengan mengubah tampilan fisik desa yang ditetapkan sebagai KALAJU, tetapi juga berupa pembekalan pemberdayaan masyarakat baik nelayan maupun istri dan keluarganya berupa bantuan pemerintah, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi, perlindungan nelayan maupun pemberdayaan nelayan lainnya.

Dalam rangka mendukung untuk kesuksesan dan kelancaran penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dan pengembangan KALAJU, perlu disusun rencana kerja program maupun rencana kerja kegiatan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan. Penyusunan rencana kerja tetap menjaga keselarasan terhadap dokumen-dokumen perencanaan di atasnya. Penyusunan Rencana Kerja PPS Bitung Tahun 2024 telah memperhatikan arah kebijakan dan juga dokumen perencanaan di atasnya sehingga tercipta keselarasan program dan kegiatan untuk mendukung pembangunan di bidang kelautan dan perikanan khususnya di sub sektor perikanan tangkap.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja PPS Bitung Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun anggaran baik pada program dukungan manajemen maupun program pengelolaan perikanan dan kelautan.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan PPS Bitung pada tahun 2024
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

II. PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Visi PPS Bitung tahun 2020-2024 adalah **Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong” di PPS Bitung.**

PPS Bitung melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat PerikananTangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur PelabuhanPerikanan

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi PPS Bitung

B. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Pada Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) sasaran program dan 18 indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Program “ Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan

Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)**

2. Sasaran Program “ Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan” dengan indikator kinerja : **Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)**
3. Sasaran Program “ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Berdaya Saing” dengan indikator kinerja:
 - a. **Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - b. **Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - c. **Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
4. Sasaran Program “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optional” dengan indikator kinerja :
 - a. **Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)**
 - b. **Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Nilai)**
5. Sasaran Program “Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)**
6. Sasaran Program “Penngelolaan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja : **Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)**
7. Sasaran Program “Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung” dengan indikator kinerja :
 - a. **Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - b. **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
 - c. **Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
 - d. **Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)**
 - e. **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera**

Bitung (Persen)

- f. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)**
- g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
- h. Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**
- i. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)**

III. RENCANA KERJA

A. RENCANA KERJA

Dalam mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, PPS Bitung telah menyusun rencana kerja yang memuat informasi terkait program, kegiatan, KRO dan RO beserta target dan anggaran yang dibutuhkan. Pada tahun 2024, PPS Bitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp17.244.014.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp14.537.980.000,- (84,31%) dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.706.034.000,- (25,69%). Dari 2 Program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan sebesar Rp63.000.000,- ;
2. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan sebesar Rp2.504.237.000,-;
3. Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan sebesar Rp8.000.000,-;
4. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan sebesar Rp130.797.000,-; serta
5. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp14.537.980.000,-.

Matriks rencana kerja PPS Bitung tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut.

URAIAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
SATKER	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG				17.244.014.000
PROGRAM	032.03.HB	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				2.706.034.000
KEGIATAN	2337	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				63.000.000
KRO	ACA	Perizinan Produk				
RO	001	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	Jumlah dokumen kapal perikanan yang diterbitkan	70	Produk	50.000.000
KRO	BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
RO	001	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	Jumlah nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya di bidang sarana penangkapan ikan	33	Orang	13.000.000
KEGIATAN	2338	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				2.504.237.000
KRO	ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan				
RO	001	Rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan/perencanaan pembangunan/pengembangan pelabuhan perikanan yang disusun	1	Rekomendasi kebijakan	150.000.000
KRO	BGA	Tata Kelola kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				
RO	002	Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	Jumlah Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	1	lembaga	2.086.237.000
KRO	RAL	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan				
RO	001	Sarana Penunjang Pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang Disediakan	Jumlah sarana Penunjang Pemungutan PNB Perikanan Tangkap yang Disediakan	1	Unit	70.000.000
KRO	RBQ	Prasarana Bidang Kemaritiman, kelautan dan Perikanan				
RO	004	Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan- Eco Fishing Port	Jumlah Pelabuhan Perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan- Eco Fishing Port	1	unit	198.000.000
KEGIATAN	2339	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan				8.000.000
KRO	QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				
RO	003	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	48	orang	8.000.000

URAIAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RINCIAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
KEGIATAN	2341	Pengelolaan Sumber Daya Ikan				130.797.000
KRO	QGA	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi				
RO	001	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	1	lembaga	83.940.000
KRO	QKB	Pemantauan Produk				
RO	001	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Jumlah laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	230	laporan	46.857.000
PROGRAM	032.03.WA	Program Dukungan Manajemen				14.537.980.000
KEGIATAN	2342	Dukungan Manajemen Internal Lingkup DJPT				14.537.980.000
KRO	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
RO	955	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	365.854.000
KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
RO	960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Jumlah layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	layanan	50.000.000
RO	963	Layanan Data dan Informasi	Jumlah layanan Data dan Informasi	1	layanan	20.000.000
RO	994	Layanan Perkantoran	Pemenuhan layanan perkantoran DJPT	1	layanan	12.775.744.000
KRO	EBB	Layanan Sarana Internal				
RO	951	Layanan sarana internal	Jumlah layanan sarana internal	1	layanan	456.811.000
RO	971	Layanan Prasarana Internal	Jumlah layanan prasarana Internal	1	layanan	465.431.000
KRO	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
RO	954	Layanan Manajemen SDM	Jumlah Layanan Manajemen SDM	1	layanan	100.000.000
KRO	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal				
RO	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	1	dokumen	84.000.000
RO	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	1	dokumen	47.000.000
RO	955	Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah layanan manajemen keuangan	1 layanan	dokumen	173.140.000

B. TARGET KINERJA

Penetapan target kinerja telah disesuaikan dengan rencana kerja PPS Bitung Tahun 2024 dan sesuai dengan arahan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung. Matriks target kinerja PPS Bitung tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)	3.353,59
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)	48.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	96
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)	50
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	670
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	30
Program Dukungan Manajemen				
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	84

		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	93,76
		17	Nilai Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)	86
		18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)	88,3

C. RENCANA PENCAPAIAN

1. **Sasaran Program “ Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”**
 - Indikator kinerja : **Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Rp. Juta)** merupakan akumulasi nilai penerimaan PNBPN yang diterima PPS Bitung sepanjang tahun 2024, diukur secara bulanan dan dilaporkan secara triwulanan. **Target 2024 sebesar Rp3.353,59 juta.**
2. **Sasaran Program “ Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan”**
 - Indikator kinerja : **Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Ton)** merupakan akumulasi volume produksi hasil perikanan tangkap yang didaratkan oleh kapal di PPS Bitung, diukur secara bulanan dan dilaporkan berkala setiap triwulanan. **Target 2024 sebesar 48.000 Ton.**
3. **Sasaran Program “ Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Berdaya Saing”**
 - Indikator kinerja: **Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisis dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)** merupakan indikator yang sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, dimana pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBPN yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan

Perikanan, diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusaha. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 100 %.**

- Indikator kinerja: **Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)** merupakan indikator indikator yang menunjukkan rata-rata nilai evaluasi kinerja operasional PPS Bitung berdasarkan pada aplikasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP). Indikator ini untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/1/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **triwulan. Target 2024 sebesar 84.**
- Indikator kinerja: **Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)** merupakan indikator indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan dengan target 2024 sebesar 96%.**

4. Sasaran Program “Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optional”

- Indikator **Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan (Persen)** merupakan indikator yang sesuai Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, dimana pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas

penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan**. **Target 2024 sebesar 50%**.

- Indikator **Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan (Nilai)** merupakan indikator yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan. SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **triwulanan**. **Target 2024 sebesar 30,10**.

5. **Sasaran Program “Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”**

- Indikator **Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)** merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Bitun. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **triwulanan**. **Target 2024 sebesar 670 kapal**.

6. **Sasaran Program “Penngelolaan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”**

- Indikator **Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)** merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan**. **Target 2024 sebesar 30%**.

7. **Sasaran Program “Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung”**

- Indikator **Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)** merupakan indikator yang menunjukkan jumlah nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang telah dinilai oleh Tim Evaluator. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 80.**
- Indikator **Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)** merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **triwulanan. Target 2024 sebesar 80.**
- Indikator **Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)** merupakan indikator yang menunjukkan LKE Rekonsiliasi Kinerja yang di Nilai oleh Tim Penilaian (Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap/Biro Perencanaan). Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 94.**
- Indikator **Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)** merupakan indikator yang menunjukkan jumlah antara nilai kualifikasi, nilai kompetensi, nilai kinerja dan nilai disiplin di PPS Bitung. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **semesteran. Target 2024 sebesar 84.**
- Indikator **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Persen)** merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:
 1. Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Strategis (10%)
 2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (15%)
 3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (10%)
 4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (45%)
 5. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa (5%)
 6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2023 (15%)Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 80.**
- Indikator **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera**

Bitung (Persen) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan BMN Satker diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode Tahun 2020- 2021 yang diselesaikan di Tahun 2023 (25%).
- 4) Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (25%).
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (12,5%).

Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 80.**

- Indikator **Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)** merupakan indikator yang menunjukkan nilai diambil dari nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang tersedia pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **semesteran. Target 2024 sebesar 93,76.**
- Indikator **Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Nilai)** merupakan indikator yang menunjukkan nilai yang diperoleh dari data input dan output yang dimasukan kedalam aplikasi SMART DJA Kemenkeu. Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **tahunan. Target 2024 sebesar 86.**
- Indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Indeks)** merupakan indikator yang menunjukkan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan public (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Indikator ini diukur dan dilaporkan secara **triwulanan. Target 2024 sebesar 88,30.**

D. RENCANA AKSI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA																
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN																								
1	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	1	Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Usaha	Sosialisasi SIJAKA SIPAUS di Pelabuhan Perikanan	19.000.000	1	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-					
					Pelaksanaan tata kelola dan pembinaan pelayanan pengusaha (pengadaan kartu mifare, kertas thermal, karcis sewa peralatan TPI)	47.215.000	1	paket	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1		
					Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan TPI Higienis	62.500.000	12	bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Surveillance ISO 9001:2015	57.600.000	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2	Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Meningkatkan	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Operasional Pelabuhan	Pemeliharaan Portal otomatis	10.000.000	12	bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					Sertifikasi CPIB	30.000.000	10	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-		
					Surveillance CPIB	8.370.000	11	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Inspeksi Pembongkaran Ikan	91.870.000	11	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Bimtek CPIB	88.780.000	5	kegiatan	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
					Rapat Monitoring dan evaluasi CPIB	14.520.000	2	kegiatan	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Pengolahan dan validasi data statistik lingkup DJPT	20.000.000	2	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
					Penandatanganan Perjanjian Kontrak dengan Pengguna Jasa Kios Pesisir dan Monitoring Penggunaan Tanah	38.000.000	2	kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang berdaya saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Usaha	Verifikasi data PIPP	16.000.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
					Bimtek PIPP	117.430.000	1	kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Monitoring dan Evaluasi PIPP	85.000.000	4	laporan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Kesyahbandaran	Operasional kesyahbandaran PPS Bitung	238.922.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
					Diseminasi regulasi kesyahbandaran dan aplikasi teman SPB	50.667.000	3	kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
					Operasional Kesyahbandaran di PP Binaan	180.190.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran	54.000.000	1	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Monitoring pelaksanaan kesyahbandaran	71.400.000	4	kegiatan	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
					Kesyahbandaran dalam rangka penanganan kebakaran, keselamatan dan keamanan kapal	26.810.000	1	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Tata Kelola PSM	24.250.000	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Operasional SHTI	68.500.000	2	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
Sosialisasi Penerapan SHTI		1	kegiatan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA													
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES		
				Diseminasi SHTI dan Penerapan lembara awal	30.100.000	1	kegiatan	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana	465.431.000	3	kegiatan	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan	Tim Kerja Tata Kelola Sarana Prasarana	Pengelolaan dan Opesional ISO 14001:2015	57.600.000	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
					Sosialisasi Tata Kelola Lingkungan Operasional dan pelaksanaan K5	27.000.000	2	kegiatan	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
					284.100.000	11	kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	Tim Kerja Kesyahbandaran	50.000.000	12	bulan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	Tim Kerja Kesyahbandaran	13.000.000	1	kegiatan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																					
7	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (yang telah dinilai WBK) di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	50.000.000	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	8.000.000	4	kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
		12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	47.000.000	4	laporan	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	100.000.000	2	laporan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	UNIT PJ	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TARGET KEGIATAN	SATUAN TARGET KEGIATAN	TARGET KEGIATAN BERKALA											
								JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pengadaan barang dan jasa	8.160.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		15 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan BMN	20.320.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		16 Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	perencanaan dan penyelenggaraan sistem akuntansi instansi dan pengelolaan keuangan lingkup DJPT	167.140.000	12	laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		17 Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen																
		18 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Survey Kepuasan Masyarakat	171.915.000	4	kegiatan	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1,0

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang disusun berdasarkan dokumen rencana strategis untuk meningkatkan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung yang terstandar. Rencana Kerja Tahunan ini memuat semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat rutin.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung akan lebih mudah melaksanakan manajemen program/kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi yang baik, terstruktur dan terukur sehingga memudahkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.